

Judul : DPR RI Dukung pengembangan kereta api di luar pulau jawa
Tanggal : Kamis, 13 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 10

DPR RI Dukung Pengembangan Kereta Api Di Luar Pulau Jawa

Senayan menyambut baik rencana Pemerintah mempercepat pembangunan kereta api di luar Pulau Jawa. Pasalnya, pengembangan transportasi massal berbasis rel di wilayah luar Jawa sangat penting untuk memperkuat konektivitas dan efisiensi logistik nasional.

ANGGOTA Komisi V DPR Musa Rajekshah mengatakan, kereta api merupakan salah satu moda darat yang sangat efektif memperkuat konektivitas dan mengurangi biaya logistik nasional. "Pembangunan jalur kereta api di luar Pulau Jawa tidak hanya akan memperluas mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak besar terhadap biaya logistik nasional," ujar Ijeck, sapaannya, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan anak buahnya untuk membangun atau memperbaiki jalur kereta api di luar Pulau Jawa. "Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur, rencanakan yang baik. Trans-Sumatra railway, Trans-Kalimantan railway, Trans-Sulawesi railway," kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Prabowo mengatakan, jika

lintasan itu dibangun, biaya logistik yang dikeluarkan petani hingga pedagang khususnya di luar Jawa bisa lebih murah. Perpanjangan lintasan kereta diperlukan untuk mengangkut hasil bumi hingga hasil tambang di wilayah-wilayah tersebut. Ijeck melanjutkan, kereta api memiliki keunggulan efisiensi dibandingkan kendaraan darat seperti truk. Karena kendaraan muatan berat itu sering kali menyebabkan kerusakan jalan dan tingginya biaya perawatan.

"Kereta api itu murah dan efisien. Kalau jalur keretanya diefektifkan untuk angkutan kontainer antar pelabuhan atau antar kota, pasti lebih hemat jangka panjang," kata mantan wakil gubernur Sumatera Utara itu.

Selain itu, Ijeck menyoroti pentingnya pembangunan jaringan kereta api di Sumatera, khususnya Sumatera Utara hingga Aceh. Dulu jalur kereta



Musa Rajekshah

api di dua provinsi bersebelahan itu pernah tersambung, tapi kini banyak jalurnya tidak aktif bahkan berubah menjadi pemukiman. "Jalur-jalur lama ini harus dibuka kembali. Saya kira perlu ada percepatan pembangunan kembali," tegasnya.

Proyek kereta api luar Jawa, tambah Ijeck, sejalan dengan program ketahanan pangan nasional yang menjadi fokus Presiden Prabowo. Dengan biaya transportasi yang lebih murah, harga bahan pokok di daerah dapat lebih terkendali.

"Kalau angkutannya murah, otomatis harga barang juga akan

terkoreksi jadi lebih baik. Ini bisa jadi salah satu solusi mendukung ketahanan pangan nasional," kata Anggota Fraksi Golkar ini.

Sementara, anggota Komisi V DPR Danang Wicaksana Sulistyana meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menindaklanjuti instruksi Presiden mempercepat pembangunan jalur kereta api di luar Pulau Jawa. Langkah ini penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi, khususnya pembangunan jaringan kereta api yang selama ini masih terpusat di Pulau Jawa.

"Juga untuk memperkuat konektivitas kawasan industri luar Jawa dan pemenuhan kebutuhan logistik nasional," ujar Danang dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).

Danang meminta, pembangunan jalur kereta api nasional luar Jawa tidak hanya difokuskan untuk angkutan penumpang, tapi juga angkutan logistik. Selama ini, kawasan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua belum mendapat porsi pengembangan yang memadai, khususnya pembangunan jaringan kereta api.

Instruksi Presiden Prabowo

harus menjadi momentum bagi Kemenhub untuk mempercepat pembangunan jalur kereta di luar Jawa. "Pembangunan ini tidak hanya soal transportasi, tetapi juga pemerataan ekonomi dan integrasi wilayah," tegas anggota Fraksi Gerindra ini.

Danang menambahkan, pembangunan jalur kereta api di luar Jawa juga akan mendukung potensi ekonomi daerah, termasuk sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang membutuhkan akses logistik efisien dan murah.

Untuk itu, Danang mendorong Kemenhub untuk melakukan perencanaan secara matang dengan melibatkan Pemerintah Pusat (Pempus), Pemerintah Daerah (Pemda) dan swasta sebagai investor. Kolaborasi antara berbagai pihak ini sangat penting agar jalur kereta api benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, kata Danang, Pemerintah juga harus memperhatikan konektivitas sarana pendukung seperti pelabuhan atau bandara di wilayah tertentu. Sehingga, pembangunan jalur kereta api berjalan terukur, transparan, dan tepat sasaran. ■ TIF